



Pemerintah Kota Mojokerto

# Indeks Kemahalan Konstruksi 2019 Kota Mojokerto

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto  
LPOMP FIA-UB



Unit Laboratorium Pengembangan Organisasi  
dan Manajemen Publik

## KATA PENGANTAR

Kebutuhan akan data yang akurat, objektif serta terkini dewasa ini semakin diminati dan ditunggu-tunggu, tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan pengambil kebijakan, namun telah merambah hingga pada masyarakat luas. Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Mojokerto berguna memberikan data yang akurat dimaksud, khususnya untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kemahalan konstruksi.

Informasi tersebut tentunya sangat dibutuhkan secara berkesinambungan, baik pemerintah, peneliti, maupun dunia usaha. Oleh sebab itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto berusaha untuk menyusun publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Mojokerto setiap tahunnya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam hal penyediaan data dan penyusunan publikasi ini. Kami berharap kritik dan saran guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Mojokerto, Oktober 2019

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Mojokerto,

TTD

**GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680206 199301 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>Cover</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3 Manfaat.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>Bab II Konsep dan Definisi</b> .....	<b>7</b>
2.1 Harga Perdagangan Besar (HPB) .....	7
2.2 HPB bahan Bangunan .....	7
2.3 Pedagang Besar dan Pedagang Eceran .....	7
2.4 Grosir atau Jumlah Besar .....	8
2.5 Kegiatan Konstruksi .....	8
2.6 Harga Sewa Alat Berat Konstruksi .....	12
2.7 Upah .....	12
2.8 Tingkat Kemahalan Konstruksi.....	13
2.9 Paket Komoditas.....	13
2.10 Kualitas Provinsi .....	13
2.11 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) .....	14
2.12 Inflator.....	14
2.13 IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi .....	15
<b>Bab III Metodologi</b> .....	<b>17</b>
3.1 Paket Komoditas.....	17
3.2 Diagram Timbang .....	18
3.3 Kegiatan Pengumpulan Data .....	20
3.4 Identifikasi Kualitas Barang .....	21
3.5 Estimasi Harga.....	22



3.6	Formula Perhitungan IKK .....	22
3.7	Metode Analisis .....	25
<b>Bab IV Ulasan Ringkas.....</b>		<b>26</b>
4.1	Profil Kota Mojokerto.....	26
4.2	Peran Sektor Konstruksi .....	31
4.3	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto .....	34
<b>Bab V Penutup.....</b>		<b>38</b>
5.1	Kesimpulan.....	38
5.2	Saran .....	38
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan, RT, dan RW di Kota Mojokerto .....	26
Tabel 4.2 Struktur Perekonomian Kota Mojokerto Tahun 2015 - 2017 ....	29
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2015 - 2017 ....	31
Tabel 4.4 Nilai IKK Kota-Kota di Jawa Timur Tahun 2015-2018.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Peta Kota Mojokerto .....	27
Gambar 4.2 Peran Sektor Konstruksi terhadap Total PDRB Kota Mojokerto (%) .....	34

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memperluas kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemanfaatan, pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), pengendalian lingkungan hidup, dan urusan wajib lainnya seperti yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat hanya pada urusan-urusan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pemberian kewenangan tersebut membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk

membayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemerataan kemampuan antar daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 26% dari total penerimaan dalam negeri netto pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menyusun Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bagi tiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pemerintah pusat membutuhkan berbagai data dan indikator penting untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam perhitungan DAU adalah alokasi dasar yang terdiri dari gaji pns daerah dan celah fiskal yang terdiri dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal meliputi indeks penduduk, indeks luar wilayah, indeks kemahalan konstruksi, IPM, dan indeks PDRB per kapita. Sedangkan kapasitas fiskal terdiri dari PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam.

Salah satu indikator penting yang dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kebutuhan fiskal. Oleh karena itu, sebagai daerah yang sedang giat-giatnya membangun, Kota Mojokerto sangat membutuhkan data harga barang-barang konstruksi yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang berimplikasi pada besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun-tahun mendatang.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka yang menunjukkan perbandingan Tingkat Kemahalan Harga Bangunan/Konstruksi (TKK) secara umum dari suatu daerah terhadap daerah lainnya. Sedangkan Tingkat Kemahalan Harga Bangunan/Konstruksi (TKK) itu sendiri merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan, dan jasa yang menjadi paket komoditas. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dihitung menurut kelompok jenis bangunan (5 kelompok) mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang dalam penghitungannya digunakan tiga komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang dan data harga jenis bahan bangunan/sewa alat dan upah jasa.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan untuk perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang merupakan salah satu komponen atau variabel dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Publikasi ini juga berguna sebagai standarisasi harga khususnya barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sehingga dapat ditentukan/dinilai kewajaran suatu anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek. Selain itu, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dihasilkan dapat membantu pihak-pihak swasta, dalam hal ini pengusaha untuk menilai kemampuan perusahaan pada saat ini dibanding pada waktu perusahaan berdiri. Tingkat kemampuan perusahaan pada saat ini dapat dipakai dalam proses pelelangan suatu proyek khususnya proyek-proyek konstruksi bangunan.

Tujuan penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto ini adalah untuk menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalokasiannya.

## 1.3 Manfaat

Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh dari penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto Tahun 2019 ini adalah:

- 1.3.1 Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kota Mojokerto kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
- 1.3.2 Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi *starting point* bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto pada tahun-tahun yang akan datang; dan
- 1.3.3 Sebagai rujukan dalam memperkirakan besaran nilai proyek pembangunan terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti tempat tinggal, sekolah, jalan dan jembatan agar penentuan besaran nilai proyek pembangunan fisik tersebut efisien dan tepat sasaran.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini nantinya akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### 1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan.

### 1.4.2 BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan Definisi berisi beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

### 1.4.3 BAB III METODOLOGI

Metodologi berisi tentang ruang lingkup, sumber data, formula penghitungan, dan Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan.

### 1.4.4 BAB IV ULASAN RINGKAS

Merupakan analisa mengenai komponen-komponen penyusun Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan nilai IKK Kota Mojokerto.

### 1.4.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Merupakan rangkuman dari BAB 1 sampai BAB 4 penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan nilai IKK Kota Mojokerto

## BAB II

### KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

#### 2.1 Harga Perdagangan Besar (HPB)

Harga Perdagangan Besar (HPB) adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang (Sirusa.bps.go.id).

#### 2.2 HPB bahan bangunan/konstruksi

HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/*supplier* bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.

#### 2.3 Pedagang Besar (PB) dan Pedagang Campuran

Pedagang Besar (PB) adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar. Sedangkan

Pedagang campuran adalah pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran (Sirusa.bps.go.id).

#### **2.4 Party/grosir atau jumlah besar**

*Party/grosir* atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.

#### **2.5 Kegiatan Konstruksi**

Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

Berdasarkan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang disusun Badan Pusat Statistik yang merupakan revisi Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000, secara umum jenis bangunan konstruksi dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu:

1. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal, mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal oleh rumah tangga.

Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung kesenian dan olahraga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya.

2. Prasarana Pertanian meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendali air, bagan, perعتakan tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi, dan sejenisnya.
3. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan, mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya maupun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya.
4. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi Mencakup Bangunan Pengolahan Penyaluran dan Penampungan Air Bersih/Air Limbah/Drainase, Bangunan Pengolahan/Penyaluran dan Penampungan Barang Migas, Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air tanah, Instalasi Listrik Bangunan Sipil, Instalasi Navigasi Laut dan Sungai, Instalasi Meteorologi dan Geofisika, Instalasi Navigasi Udara, Instalasi

Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu -Rambu Jalan Raya, Instalasi Telekomunikasi.

5. Bangunan Lainnya Mencakup Bangunan Terowongan, Bangunan Sipil Lainnya, Pemasangan Perancah, Pemasangan Bangunan Kostruksi Prefab dan Pemasangan Kerangka Baja, Pengerukan, Konstruksi Khusus Lainnya, Instalasi Jaringan Pipa, Instalasi Bangunan Sipil Lainnya, Dekorasi Eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Berdasarkan asas keterbandingan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), bahwa untuk setiap daerah harus mempunyai bobot nilai di setiap jenis bangunan sedangkan pada kenyataannya tidak setiap kabupaten/kota memiliki kelima jenis bangunan tersebut, maka dalam penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) jenis bangunan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, terdiri dari:
  - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas.
  - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun dan bangunan monumental.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan terdiri dari:

- a. Bangunan jalan, jembatan dan landasan meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
  - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta.
  - c. Bangunan dermaga meliputi: pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
3. Bangunan lainnya terdiri dari:
- a. Bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman.
  - b. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian meliputi: reservoir, bendung, embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib dan viaduk.
  - c. Bangunan elektrikal meliputi : pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
  - d. Konstruksi telekomunikasi udara meliputi : konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar dan bangunan antena.
  - e. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi, kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.

- f. Konstruksi sentral telekomunikasi meliputi : bangunan sentral telepon/telegraph, konstruksi bangunan menara pemancar dan bangunan stasiun kecil.
- g. Instalasi air meliputi instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
- h. Instalasi listrik meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- i. Instalasi gas meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- j. Instalasi listrik jalan.
- k. Instalasi jaringan pipa: jaringan pipa gas, jaringan air dan jaringan minyak.

## **2.6 Harga sewa alat berat konstruksi**

Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/hari.

## **2.7 Upah**

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.

## 2.8 Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan.

## 2.9 Paket komoditas

Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness* dan *comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.

## 2.10 Kualitas provinsi

Kualitas provinsi adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut. Diagram Timbang atau bobot yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terdiri dari

diagram timbang Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menurut kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) masing-masing kelompok jenis bangunan. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan dalam memperoleh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) umum setelah diperoleh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing kelompok jenis bangunan.

### **2.11 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)**

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi rata-rata Nasional.

### **2.12 Inflator**

Inflator merupakan nilai yang digunakan sebagai penyesuaian Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terhadap kenaikan bahan bangunan/konstruksi. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2017 tidak menggunakan inflator melainkan menggunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan. Tahun-tahun berikutnya kembali digunakan inflator yang mencerminkan kenaikan Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) konstruksi selama periode tahun tersebut, serta kota acuan berubah menjadi Kota Semarang.

## 2.13 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/konstruksi

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/konstruksi yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan/konstruksi yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi di suatu daerah. Manfaat Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) bahan bangunan/konstruksi semakin diperlukan terutama didalam penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2005 tanggal 9 Nopember 2005 tentang Petunjuk Teknis, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005. Penyajian data Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) konstruksi dibuat menjadi dua bentuk penyajian, yaitu :

1. Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) konstruksi menurut kelompok barang Jumlah kelompok jenis barang yang dihitung dalam kelompok Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) bahan bangunan/konstruksi adalah sebanyak 23 kelompok barang, yaitu kelompok kayu gelondongan; barang galian segala jenis; kayu gergajian dan awetan; kayu lapis dan sejenisnya; bahan bangunan/konstruksi dari kayu; cat, vernis, dan lak; aspal; hasil kilang minyak lainnya; barang-barang dari plastik; kaca lembaran; bahan bangunan/konstruksi dari keramik dan tanah liat; semen; batu split; barang-barang lainnya dari bahan bukan logam; barang-barang

dari besi dan baja dasar; barang-barang dari logam dasar bukan besi; alat pertukangan dari logam; bahan bangunan/konstruksi dari logam; barang-barang logam lainnya; alat-alat berat dan perlengkapannya; mesin listrik dan pengatur listrik; perlengkapan listrik lainnya; dan aki.

2. Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) konstruksi menurut kelompok bangunan/ konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) konstruksi menurut kelompok bangunan/konstruksi dibagi dalam 5 jenis bangunan/konstruksi, yaitu:

- a. Bangunan/konstruksi tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
- b. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk pertanian
- c. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan.
- d. Bangunan/konstruksi dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi.
- e. Bangunan/konstruksi lainnya.

Selanjutnya Indeks Harga Perdagangan Pasar (IHPB) konstruksi umum yang merupakan indeks tertimbang dari indeks ke lima kelompok bangunan/konstruksi di atas digunakan dalam penyesuaian Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) secara nasional (inflator).

## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1 Paket Komoditas

Data dasar penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah harga bahan bangunan/konstruksi, balas jasa pekerja sektor konstruksi dan sewa alat berat dilakukan secara triwulanan. Harga tersebut meliputi harga 103 kualitas barang yang berasal dari 33 jenis barang, 5 jenis balas jasa pekerja dan harga sewa 8 macam alat berat sektor konstruksi.

Kualitas yang terpilih pada penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) periode berjalan tidak harus selalu sama dengan tahun sebelumnya. Dalam pemilihan paket komoditas Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), perlu diperhatikan asas pemilihan paket komoditas sebagai berikut :

1. *Comparability* (keterbandingan);
2. *Representativeness* (mewakili).

Berdasarkan asas tersebut dapat ditentukan paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto di tahun 2019 yaitu terdiri dari 33 jenis barang meliputi tanah urug, pasir, batu pondasi, batu bata, batako, bata ringan, batu split, seng gelombang, paku, semen Portland, besi beton, bak mandi fiber, kloset, seng plat, pipa pvc, kayu balok, kayu papan, kayu lapis/triplek, cat emulsi, cat minyat, keramik, genteng/atap, kaca, aspal, gypsum, kabel, Bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II, mesin pompa air, rangka atap baja, alumunium, tangki air fiber, lampu, dan MCB. Sedangkan 5 jenis balas jasa pekerja meliputi upah kepala

tukang, upah tukang batu, upah tukang kayu, upah instalasi listrik, dan upah pembantu tukang. 8 sewa alat berat meliputi ekskavator, buldozer, loader (wheel atau track), tandem/vibrating roller, dump truck, motor grader, asphalt finisher, dan generator set.

### **3.2 Diagram Timbang**

Diagram timbang atau bobot terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi digunakan untuk menghitung Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) sedangkan diagram timbang umum digunakan untuk menghitung Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

#### **3.2.1 Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan/Konstruksi**

Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi disusun berdasarkan besarnya andil atau nilai masing-masing jenis bahan bangunan/konstruksi untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas dan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi. Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi menggunakan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi termasuk sewa alat yang dibutuhkan atau digunakan untuk membangun 1 (satu) unit jenis bangunan/konstruksi. Jenis bangunan/konstruksi yang dimaksud terdiri dari tiga kelompok jenis bangunan/konstruksi, yaitu:

1. Gedung dan bangunan yang meliputi konstruksi tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
2. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, dan bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;
3. Bangunan/konstruksi lainnya, yang meliputi bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan

Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi, selain data hasil studi, ditunjang pula dengan data tabel *Input-Output* dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor. Sesuai dengan tujuan penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), maka penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, artinya seluruh kabupaten/kota

menggunakan satu penimbang yang berlaku secara nasional, meskipun memiliki struktur tanah dan kondisi yang berbeda.

### 3.2.2 Diagram Timbang Umum

Diagram timbang umum disusun berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang dikeluarkan untuk pembangunan/konstruksi fisik, seperti pembangunan/konstruksi gedung kantor, rumah dinas, jalan, jembatan, lapangan olahraga dalam beberapa tahun. Nilai pengeluaran tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok jenis bangunan/konstruksinya, kemudian dibuat perkiraan persentase total pengeluaran masing-masing kelompok jenis bangunan/konstruksi tersebut terhadap total seluruh pengeluaran. Selanjutnya nilai tersebut di *update* setiap tahun untuk mendapatkan nilai penimbang yang lebih *representative*.

### 3.3 Kegiatan Pengumpulan Data

Data harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat-alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan adalah harga-harga pada berbagai kategori, yaitu pedagang grosir, produsen, pedagang grosir merangkap eceran, pedagang eceran (harga tanpa ongkos angkut) dan kategori lainnya seperti kontraktor dan instansi terkait lainnya, khususnya untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat dan upah pekerja/jasa konstruksi. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dalam empat tahap triwulanan, yaitu triwulan

pertama (dilaksanakan Bulan Februari), triwulan kedua (dilaksanakan Bulan Mei), triwulan ketiga (dilaksanakan Bulan Agustus) dan triwulan keempat (dilaksanakan Bulan November). Data harga ini dikumpulkan melalui survei harga perdagangan besar barang-barang konstruksi dengan menggunakan daftar HPB-K.

Sementara itu, data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto tahun 2019 adalah hasil survei HPB-K triwulan II dalam periode pencacahan bulan Mei 2019. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 33 jenis barang, 5 jenis balas jasa pekerja dan 8 macam alat berat sektor konstruksi. Data lain yang dikumpulkan adalah perkiraan persentase pengeluaran kegiatan pembangunan fisik gedung atau konstruksi masing-masing kelompok jenis bangunan terhadap total nilai pengeluaran kegiatan pembangunan tersebut. Data ini diperoleh dari pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **3.4 Identifikasi Kualitas Barang**

Setelah menetapkan paket komoditas Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan harga bahan bangunan/konstruksi, kegiatan selanjutnya adalah melakukan kegiatan Survei Identifikasi Kualitas Barang (SIKB). Kegiatan ini dimaksudkan untuk validasi data harga dengan cara mengumpulkan data harga seluruh kualitas dari komoditas terpilih dan memastikan/mencocokkan bahwa jenis barang dan harga adalah untuk jenis barang dengan kualitas yang ditetapkan dalam paket komoditas Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). SIKB

juga digunakan sebagai dasar justifikasi untuk mendapatkan harga dengan kualitas barang yang setara jika kualitas yang tercakup dalam paket komoditas tidak terdapat di provinsi tertentu.

### **3.5 Estimasi Harga**

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks spasial yang akan digunakan sebagai pendekatan terhadap tingkat kesulitan geografis antar daerah, sehingga data harga harus mempunyai tingkat keterbandingan, yaitu mempunyai kualitas sama atau setara dan satuan yang standar untuk seluruh tempat/daerah. Untuk daerah yang tidak terdapat barang sesuai kualitas dalam paket komoditas Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) akan dilakukan estimasi harga untuk mendapatkan data harga jenis barang dengan kualitas sama atau setara.

### **3.6 Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)**

Seperti halnya diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) provinsi juga dihitung menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi yang mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Sejak tahun 2015, angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) disajikan dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Kota Semarang adalah salah satu daerah di Indonesia

yang memiliki angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang paling dekat dengan rata-rata Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 491 Kabupaten/kota sama dengan 100, sehingga Kota Semarang sebagai ibukota provinsi akan dipilih sebagai kota acuan. Kota Semarang sebagai kota acuan pada penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2018 juga akan digunakan untuk penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2019. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)nya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar. Penghitungan IKK Kota Mojokerto 2019 dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

**1. Penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota**

Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Keterangan:

$NK_j$  = Nilai Komponen ke-j

$p_k$  = Harga material/upah/sewa alat ke-k

$q_k$  = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

$n$  = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

## 2. Menghitung Purchasing Power Parity (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi Country Product Dummy (CPD)

Model regresi CPD adalah sebagai berikut :

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

$NK_j$  = Nilai Komponen ke-j

$C_i$  = dummy kabupaten/kota ke-i

$P_j$  = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

$\alpha_i$  dan  $\beta_j$  = Koefisien regresi

$PPP$  (Purchasing Power Parity) $_{Sistem_t} = \exp(\alpha_i)$

## 3. Menghitung PPP bangunan

Untuk menghitung PPP bangunan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_t} = \prod_{i=1}^n (PPP_{Sistem_t})^{w_{2i}}$$

$n$  = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

#### 4. Menghitung PPP Proyek

Untuk menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometric dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left( \prod_{i=1}^n PPP_{Bangunan_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$n$  = Jumlah bangunan dalam suatu proyek

#### 5. Menghitung IKK Kabupaten/Kota

Untuk menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left( \prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_{1i}} \right) \cdot 100$$

$n$  = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

### 3.7 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari obyek penelitian. Dalam publikasi ini, analisis tersebut digunakan untuk menginterpretasikan angka Indeks Kemalahan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto,

## BAB IV

### ULASAN RINGKAS

#### 4.1. Profil Kota Mojokerto

##### 4.1.1. Letak Geografis

Secara geografis Kota Mojokerto berada di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, dengan luas wilayah 16,47 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 18 Kelurahan. Rincian jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan kelurahan di setiap kecamatan di Kota Mojokerto sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan, RT, dan RW di Kota Mojokerto**

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Prajurit Kulon	6	48	192
2.	Megarsari	6	77	296
3.	Kranggan	6	50	188
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>175</b>	<b>676</b>

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2018

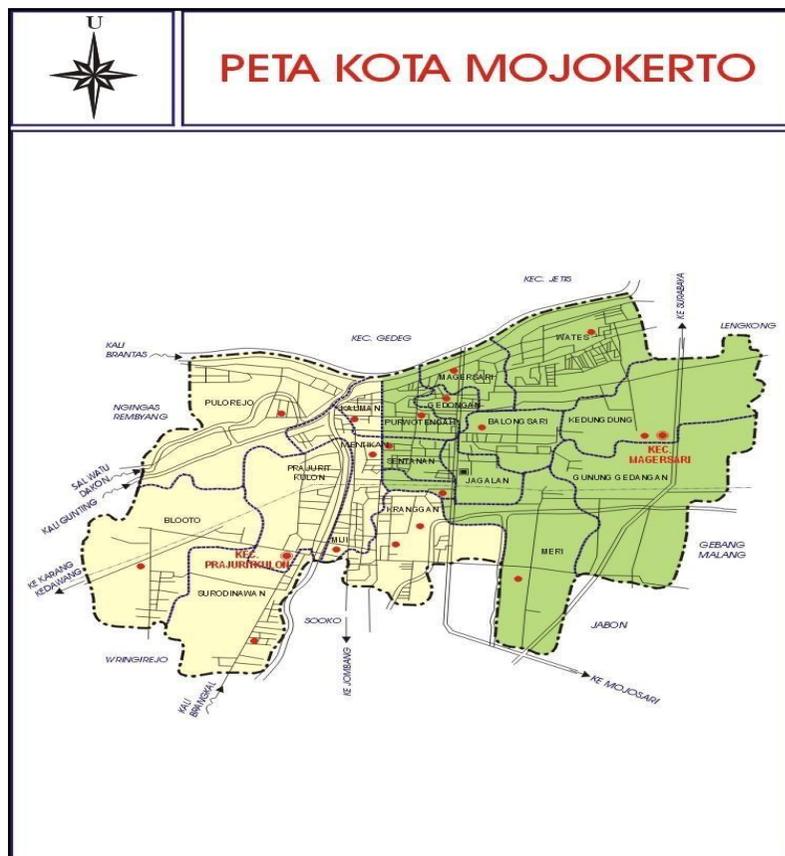
Kota Mojokerto terbentang pada 7<sup>o</sup>27' 0.16" sampai 7<sup>o</sup> 29' 37.11" Lintang Selatan dan 112<sup>o</sup> 27' 24" Bujur Timur dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke Timur dan Utara antara 0 - 3 % serta dengan ketinggian rata-rata ± 22 m di atas permukaan laut.

Secara administratif wilayah Kota Mojokerto berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto, batasan administratif Kota Mojokerto sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas, yang membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
3. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kota Mojokerto mempunyai jumlah penduduk sebesar 142.574 jiwa, yang terdiri dari 70,692 laki-laki dan 71.882 perempuan, yang terbagi kedalam 3 kecamatan yaitu Prajurit Kulon, Magersari, dan Kranggan (Kota Mojokerto Dalam Angka 2018). Berikut peta daerah Kota Mojokerto:



**Gambar 4.1: Peta Kota Mojokerto**

Sumber: Olahan Peneliti 2019

#### 4.1.2. Perekonomian Kota Mojokerto

Pada tahun 2016 dan 2017 kondisi perekonomian Kota Mojokerto memiliki besaran absolut yang berkecenderungan mendekati besaran-besaran pada saat sebelum terjadinya krisis. Dengan kata lain, perekonomian Kota Mojokerto sudah mulai menggeliat, menunjukkan perbaikan atau bahkan kemajuan yang cukup berarti. Dengan demikian, kekhawatiran terjadinya set back pada jaman sebelum krisis, sedikit demi sedikit bisa mulai dieliminir.

Aktifitas pembangunan yang terjadi di Kota Mojokerto khususnya bidang ekonomi, pada umumnya akan mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan tersier. Pengertian ini bukan berarti bahwa produksi sektor primer secara kuantitas nilai absolut turun, namun diartikan tingkat kenaikan produksi sektor primer kalah cepat dibandingkan dengan tingkat kenaikan pada sektor-sektor hilirnya. Kenyataan ini sangat wajar dan juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Mojokerto telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya.

Tabel 4.2. Struktur Perekonomian Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2018

Lapangan Usaha		2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.67	0.65	0.62
B	Pertambangan dan Penggalian	0.0	0.0	0.0
C	Industri Pengolahan	11.30	11.45	11.56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.10
F	Konstruksi	10.99	10.86	10.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.26	29.62	30.11
H	Transportasi dan Pergudangan	2.62	2.70	2.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.82	6.87	6.93
J	Infomasi dan Komunikasi	11.81	11.84	11.61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.47	8.29	8.22
L	Real Estate	2.82	2.75	2.75
M,N	Jasa Perusahaan	0.78	0.78	0.79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.79	4.69	4.76
P	Jasa Pendidikan	4.69	4.56	4.45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.15	1.18	1.15
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.71	3.56	3.54
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kota Mojokerto

Sumbangan terbesar pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 30,11 persen, kemudian lapangan usaha kategori Infomasi dan Komunikasi sebesar 11,61 persen, lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 11,56 persen, lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 10,63 persen, lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,22 persen, dan lapangan

usaha kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,93. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada Tahun 2017 sebesar 5,65 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan paling tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Penyediaan informasi dan komunikasi sebesar 7,36 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,86 persen, industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,16 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pertumbuhannya hanya 1,62 persen, dan lapangan usaha yang tidak mengalami pertumbuhan adalah Pertambangan dan Penggalian, karena di Kota Mojokerto tidak ada pertambangan.

Pada tahun 2018 sebesar 5,80 persen, lebih cepat dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,65 persen. Pertumbuhan paling tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Penyediaan informasi dan komunikasi sebesar 7,89 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,22 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,21 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pertumbuhannya hanya 0,77 persen, dan lapangan usaha yang tidak mengalami pertumbuhan adalah Pertambangan dan Penggalian, karena di Kota Mojokerto tidak ada pertambangan.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2018

Lapangan Usaha/Industri		2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.97	1.62	0.77
B	Pertambangan dan Penggalian	0.0	0.0	0.0
C	Industri Pengolahan	5.70	6.16	5.79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.30	4.20	4.88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.01	4.98	4.23
F	Konstruksi	4.85	6.08	5.82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.53	6.16	6.21
H	Transportasi dan Pergudangan	5.54	6.86	6.22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.25	7.36	7.89
J	Infomasi dan Komunikasi	7.24	7.36	7.89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.12	3.14	4.64
L	Real Estate	4.99	3.74	3.97
M,N	Jasa Perusahaan	4.95	5.29	5.34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5.13	3.36	4.42
P	Jasa Pendidikan	5.71	3.81	4.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.76	5.41	5.63
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.56	3.91	4.36
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5.77</b>	<b>5.65</b>	<b>5.80</b>

Sumber : BPS Kota Mojokerto

#### 4.2 Peran Sektor Konstruksi

Pembangunan merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Salah satu sektor yang berperan penting dan erat kaitannya dengan pembangunan adalah sektor konstruksi. Apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan maraknya pembangunan sarana dan prasarana, sepertinya sektor konstruksi akan terus

mengalami pertumbuhan. Demikian juga jika dilihat dari Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Sektor Konstruksi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Artinya dalam beberapa tahun ke depan sektor konstruksi dapat menjadi ladang investasi yang potensial.

Selama ini terdapat enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan, terutama nonmigas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, dan jasa keuangan. Namun untuk tahun 2019, pemerintah akan mendorong peningkatan tiga sektor prioritas, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pada 2018, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 6,1 persen. Untuk mendorong pencapaian target tersebut, pemerintah berupaya untuk berinvestasi secara selektif dan memfasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

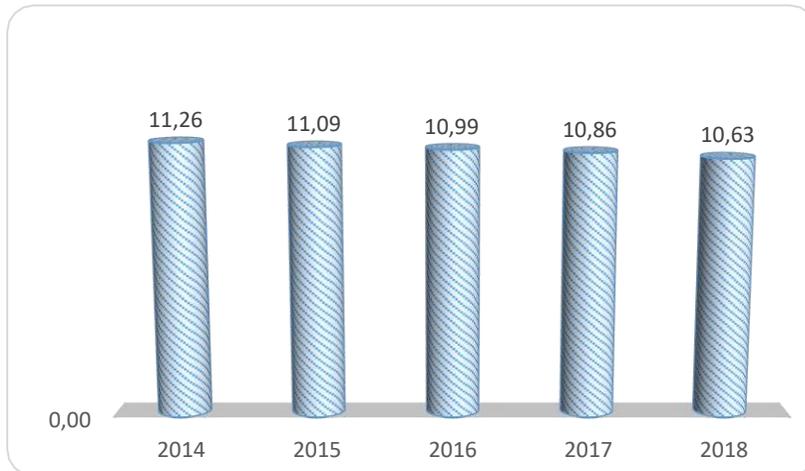
Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah industri pengolahan (terutama nonmigas), informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, jasa keuangan, dan perdagangan. Sektor konstruksi menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan kontribusi 0,51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,88 persen.

Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38 persen. Angka ini menjadikannya di urutan ke-4

setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Sektor konstruksi di Provinsi Jawa Timur masih tetap potensial di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp1.649 triliun pada tahun 2017. Dari jumlah itu, sekitar 9,4% atau sekitar Rp 150 triliun berasal dari sektor konstruksi. Kontribusi tersebut tentu akan semakin mempercepat pembangunan infrastruktur secara otomatis dan juga akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa.

Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa sektor konstruksi mengalami peningkatan nilai *output* yang signifikan setiap tahunnya serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Provinsi Jawa Timur juga dikenal sebagai kawasan industri, tetapi bidang konstruksi masih memberikan sumbangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sektor ini tetap menjadi salah satu sektor yang mempunyai peranan penting bagi Provinsi Jawa Timur

Dari sisi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peran sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2014-2018 cukup tinggi. Tahun 2014 peran sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 11,26 persen. Pada empat tahun berikutnya sedikit mengalami penurunan hingga mencapai 10,63 persen pada tahun 2018.



Gambar 4.2 Peran Sektor Konstruksi terhadap Total PDRB Kota Mojokerto (%)  
Sumber : data diolah (peneliti, 2019)

Peran ini walaupun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun posisinya masih di kisaran 10 persen. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ini, sektor konstruksi di Kota Mojokerto telah berkembang dan menjadi sektor yang potensial serta berperan penting dalam pembangunan di Kota Mojokerto.

#### 4.3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto

Berdasarkan data-data penunjang di atas selanjutnya dilakukan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto. Seperti dijelaskan pada bagian metodologi, angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ini dihitung dengan menggunakan 3 data penunjang, yaitu: paket komoditas, diagram timbang, dan harga bahan bangunan yang dominan yang menjadi paket komoditas penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah jenis indeks spasial yang menunjukkan perbandingan antara dua atau beberapa wilayah dalam satu kurun waktu. Sehingga angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tidak dapat membandingkan antara dua atau beberapa kurun waktu. IKK 2019 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. Untuk tahun 2019 Kota yang menjadi acuan adalah Kota Semarang, karena indeks Kota Semarang mendekati indeks rata-rata nasional, selain itu kelengkapan sumber data juga menjadi pertimbangan. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di Kota Mojokerto. IKK tahun 2019 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2020. Berikut data perkembangan IKK Kota Mojokerto dan kota lainnya di Jawa Timur tahun 2015-2018:

**Tabel 4.4 Nilai IKK Kota-Kota di Jawa Timur Tahun 2015-2018**

Kota	2015	2016	2017	2018
	IKK	IKK	IKK	IKK
Kota Kediri	95,7	96,14	93,22	103,67
Kota Blitar	94,7	97,31	98,61	100,14
Kota Malang	97,5	100,64	96,48	102,49
Kota Probolinggo	87,5	93,59	90,78	98,22
Kota Pasuruan	97,4	93,05	93,19	101,24
<b>Kota Mojokerto</b>	<b>93,6</b>	<b>92,82</b>	<b>95,33</b>	<b>108,25</b>
Kota Madiun	98,2	100,77	101,181	105,83
Kota Surabaya	100	100	100	109,67
Kota Batu	89,6	98,61	97,53	96,11

Sumber : data diolah (peneliti, 2019)

Pada tahun 2015 – 2017 kota yang menjadi pembanding dalam perhitungan IKK adalah Kota Surabaya, sedangkan pada tahun 2018 – 2019 kota yang digunakan sebagai acuan berubah menjadi Kota Semarang. Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas di Kota Mojokerto dibandingkan dengan Kota Surabaya pada tahun 2015 lebih murah 6,41 persen, pada tahun 2016 lebih murah 7,18 persen, dan pada tahun 2017 lebih murah 4,67%. Sedangkan pada tahun 2018, untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas di Kota Mojokerto lebih mahal 8,25% apabila di bandingkan dengan Kota Semarang yang memiliki IKK sebesar 100. Semakin sulit kondisi geografis suatu daerah maka semakin tinggi tingkat harganya. Dengan kata lain bahwa harga-harga bahan bangunan di Kota Mojokerto masih lebih rendah dari harga-harga bahan bangunan di Kota Surabaya dan lebih mahal dari Kota Semarang.

Pada Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2019 ada jenis barang yang tidak digunakan dalam perhitungan IKK Kota Mojokerto, yaitu Kayu Jati, karena harga jenis barang tersebut mempunyai selisih yang sangat jauh. Selain itu patokan harga kayu jati tidak relevan sebagai pembanding dengan Kota Mojokerto, sehingga akan mempengaruhi hasil perhitungan secara signifikan. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan formula yang terdapat di bab metodologi, maka didapat angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto pada tahun 2019 adalah **sebesar 116**. Hal ini berarti bahwa tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi di Kota Mojokerto lebih tinggi 16 persen pada tahun 2019, apabila dibandingkan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi

(IKK) Kota Semarang. Selain itu apabila dilihat perkembangannya IKK Kota Mojokerto pada tahun mengalami peningkatan sebesar 7,75 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Mojokerto pada tahun 2019 sebesar 116. Hal tersebut mengartikan bahwa pada tahun 2019 tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi di Kota Mojokerto lebih tinggi 16 persen, apabila dibandingkan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Semarang. Selain itu IKK Kota Mojokerto pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,75 dari tahun 2018.

#### 5.2 Saran

Dalam memperkirakan besaran nilai proyek pembangunan terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik hendaknya pemerintah daerah menjadikan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai rujukan, agar penentuan besaran nilai proyek pembangunan fisik tersebut efisien dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2005 tanggal 9 Nopember 2005 tentang Petunjuk Teknis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

